LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

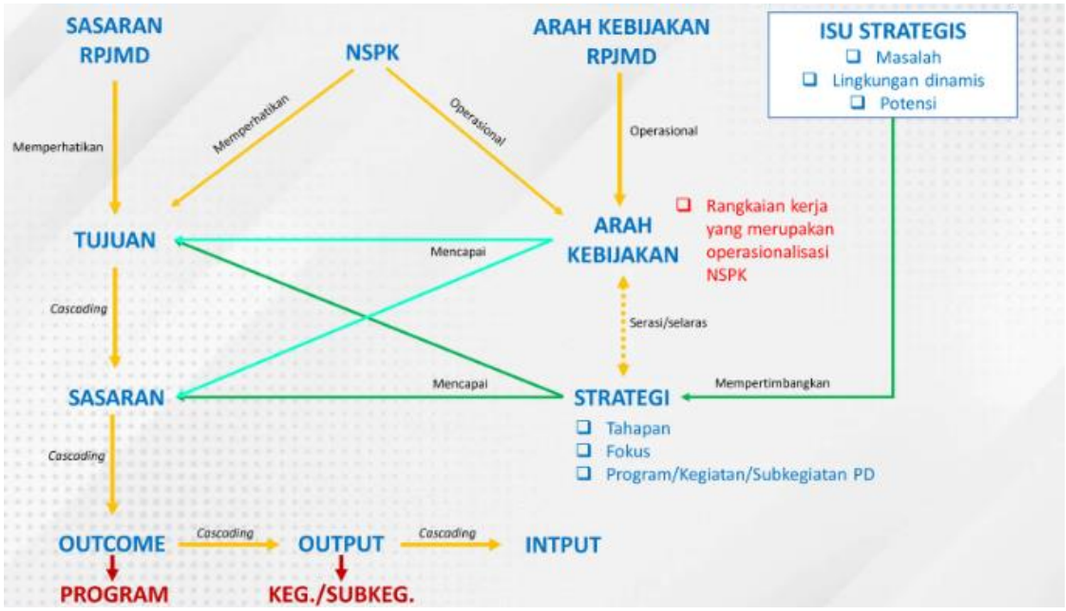
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta dalam rangka memastikan kesinambungan pembnagunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat pasca pemilihan kepala daerah serentak, Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk diinstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

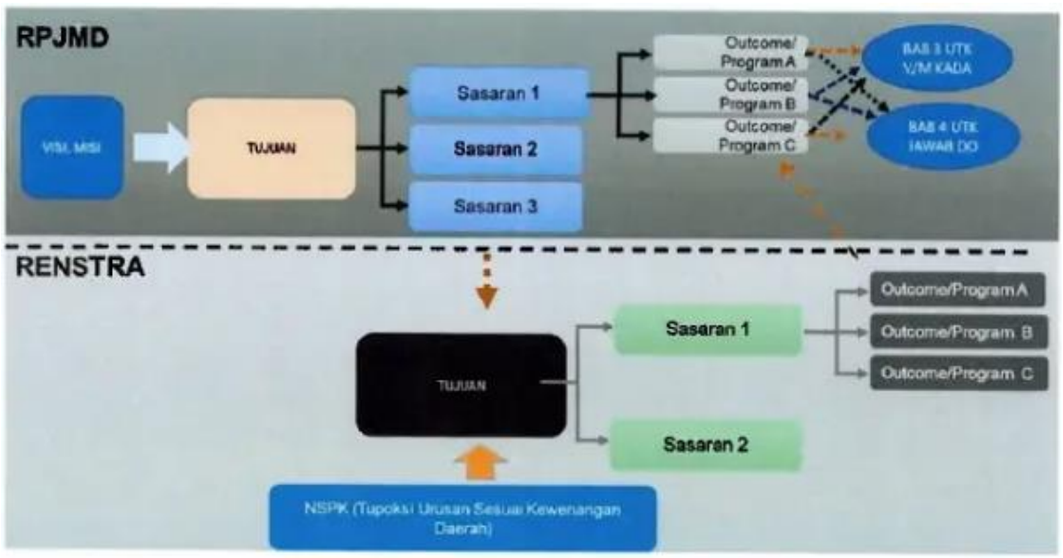
Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2029; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2029 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Konsep Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.2.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nonor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nonor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

23. Peraturan Badan Siber dan sandi Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika mengatur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika, termasuk Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pemberian Pelayanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
a. Identifikasi Permasalahan;
b. Perumusan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.2. Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;.
3.3. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Gambaran Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, memiliki peran kursial dalam menyajikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses terkait tiga urusan pokok yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika secara efektif mengumpulkan, mengelola, dan mempublikasikan data terkait implementasi Transformasi Digital di berbagai Perangkat Daerah melalui Kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi). Ini mencakup informasi mengenai kemajuan digitalisasi layanan publik, infrastruktur TIK yang digunakan, aplikasi dan sistem informasi yang diterapkan, serta kebijakan dan regulasi terkait Pemerintah Digital.

Sesuai intruksi dari Kementrian PANRB bahwa kebijakan Pemerintah Digital dengan indikator Indeks Pemdi sebagai penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks SPBE. Penyajian data Pemerintah Digital bertujuan untuk meningkatkan transparasi penyelenggaraan pemerintah dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mengadopsi teknologi informasi. Masyarakat dan pihak terkait dapat memantau perkembangan Pemerintah Digital dan memberikan masukan. Data dan informasi Pemerintah Digital yang terstruktur menjadi landasan penting bagi pimpinan daerah dan pengambilan kabijakan dalam merencanakan, mengevaluasi, dan menempurnakan implmentasi Pemerintah Digital secara keseluruhan.

Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik sektoral yang relevan dengan urusan Pemerintah daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastika sinkronisasi data dan metodologi yang digunakan, sehingga data yang dihasilkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Data statistik yang disajikan dalam berbagai format yang mudah dipahami pengguna, seperti publikasi cetak, infografis, *dashboard* statistik daerah, dan

portal satu data. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, akademis, pelaku usaha, Pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengambilan keputusan.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam mengelola dan mangamankan informasi sensitif milik Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem persandian. Ini mencakup pengelolaan kunci kriptografi, implementasi protokol keamanan, dan sosialisasi pentingnya keamanan informasi kepada seluruh perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan persandian untuk mengamankan informasi elektronik dan penyimpanan data Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran data, dan gangguan terhadap sistem informasi. Selain aspek teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan dalam meningkatkan kesadaran keamanan siber di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan sosialisasi. Pelayanan disusun berdasarkan evaluasi capaian periode sebelumnya dan menjadi dasar penyusunan strategi, program, dan kebijakan operasional untuk periode Renstra 2025–2029 agar selaras dengan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi informasi yang dinamis.

Setelah dianalisis keberhasilan yang telah dicapai dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020-2024 cenderung positif, mayoritas indikator melampaui target. Secara umum capaian kinerja ini menunjukkan bahwa fondasi transformasi digital dan tata kelola data di Kabupaten Nganjuk sudah kuat untuk mendukung target Renstra 2025-2029.

Dengan menyajikan data dan informasi yang komprehensif dan dianalisis secara mendalam, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan gambaran cukup jelas mengenai pelaksanaan urusan Ini mencakup informasi mengenai kemajuan digitalisasi layanan publik, infrastruktur TIK yang digunakan, aplikasi dan sistem informasi yang diterapkan, serta kebijakan dan regulasi terkait Pemerintah Digital, Statistik, dan Persandian yang menjadi tanggung jawab 5 (lima) tahun terakhir. Hasil analisis ini akan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk masa depan.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

I. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik.

II. Fungsi

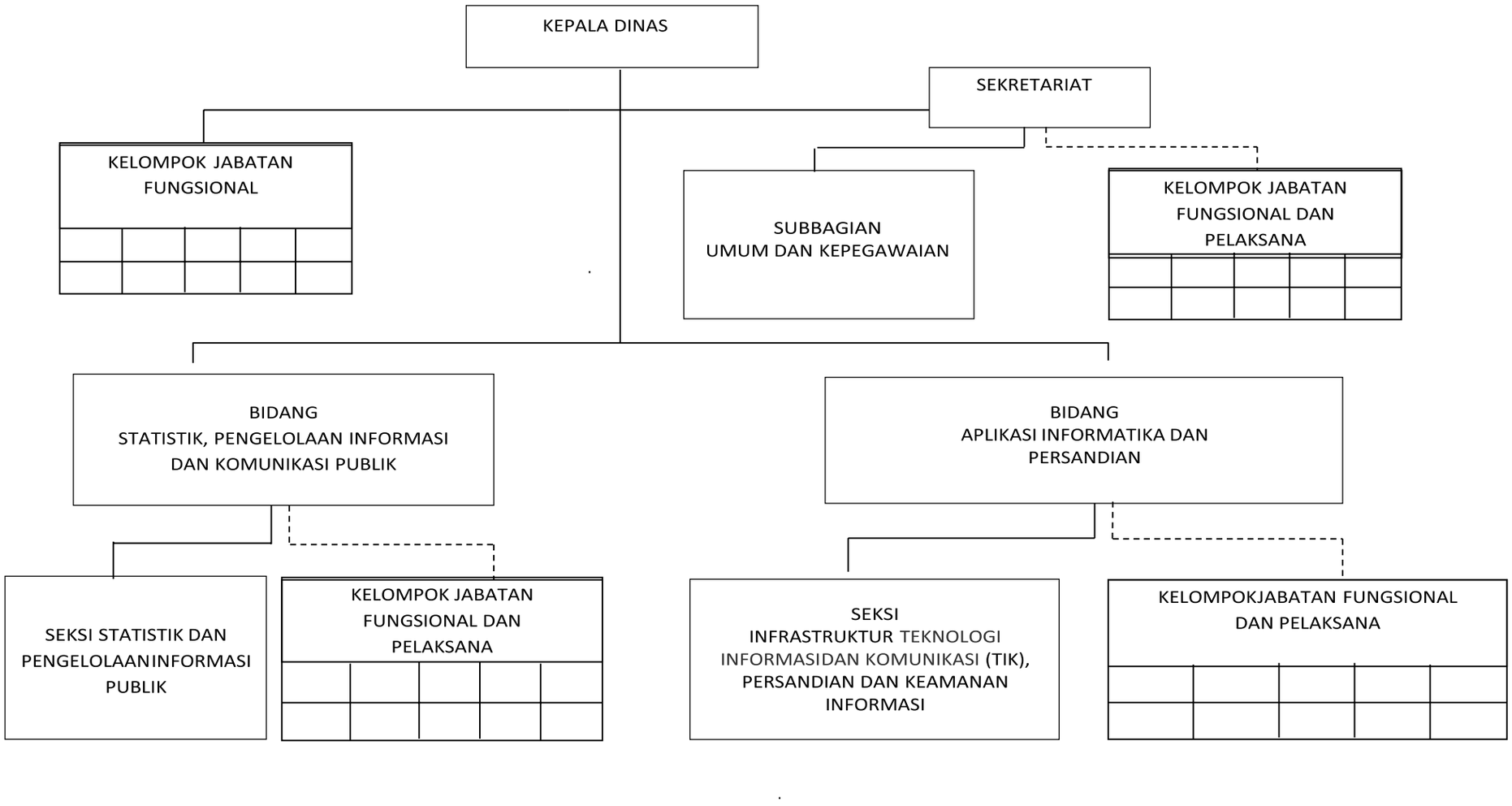
Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi:

a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c) pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
e) pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
f) pengelolaan dan pengembangan *e-government* dan *smart city*;

g) pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
h) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi sebagaimana tabel di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



b. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk saat ini berkedudukan Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2022 didukung oleh 79 (tujuh puluh sembilan) orang pegawai/karyawan yang terdiri 21 (duapuluh satu) orang PNS dan 58 (lima puluh delapan) orang karyawan dengan status tenaga kontrak. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan pembagian tugas bagi Pejabat Eselon, sesuai dengan Lampiran XIV.2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Pendidikan, Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan, Urusan, Lulusan sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S-2	2 orang	
2.	S-1	27 orang	
3.	D-4	-	
4.	D-3	4 orang	
5.	SLTA	2 orang	
6.	SMP	-	
	Jumlah	**35 orang**	

Sumber: Data Kepegawaian (Aplikasi Simas dan DUK)

Tabel 2.1.2
Data Pegawai Menurut Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IX	13 Orang	PPPK
2.	Golongan VII	2 Orang	PPPK
3.	Golongan IV	3 orang	PNS

4.	Golongan III	14 orang	PNS
5.	Golongan II	3 orang	PNS
6.	Golongan I	-	PNS
	Jumlah	**35 orang**	ASN

Sumber: Data Kepegawaian (Aplikasi Simas dan DUK

Tabel 2.1.3

Data Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural	9 orang	
2.	Fungsional Tertentu	20 orang	
3.	Fungsional Pelaksana	6 Orang	
	Jumlah	**35 orang**	

Sumber: Data Kepegawaian (Aplikasi Simas dan DUK

Tabel 2.1.4

Data Pegawai berdasarkan Urusan

No	Urusan	Jumlah	Ket
1.	Sekretariat	7 Orang	
2.	Komunikasi dan Informatika	24 orang	
3.	Statistik	3 orang	
4.	Persandian	1 orang	
	Jumlah	**35 orang**	

Sumber: Data Kepegawaian (Aplikasi Simas dan DUK

Tabel 2.1.5

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Yang Lulusan IT

No	LULUSAN	Jumlah	Ket
	ASN		
1.	Sarjana Komunikasi dan Informatika dan serumpun	20 orang	
2.	Sarjana Non Komunikasi dan Informatika	15 orang	
	Jumlah	**35 orang**	
	Non PNS		
1.	Sarjana Komunikasi dan Informatika dan serumpun	8 orang	
2.	Sarjana Non Komunikasi dan Informatika	38 orang	
	Jumlah	**46 orang**	

Sumber: Data Kepegawaian (Aplikasi Simas dan DUK

2) Sarana dan Prasarana Pendukung

Sedangkan bila ditinjau dari aspek sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Kegiatan Komunikasi dan Informatika, fasilitas yang dimiliki sebagaimana berikut :

a) Kendaraan Bermotor.
   - Mobil Dinas = 2 buah
   - Mobil Operasional = 5 buah
   - Roda 2 Operasional = 3 buah

b) Gedung Kantor
   - Ruang Kepala Dinas
   - Ruang Sekretaris
   - Ruang Kepala Bidang
   - Ruang Rapat
   - Ruang Sekretariat dan Bidang-bidang
   - Ruang Data Center
   - Ruang Studio RSAL FM
   - Command Center
   - Mushola

c) Komputer
   - Komputer PC = 82 Unit
   - Laptop = 44 Unit
   - Printer = 21 Unit
   - Scanner = 3 Unit
   - Alat Penghancur Kertas = 3 Unit

d) Jaringan Komputer
   - Internet

     Layanan akses internet saat ini menggunakan fiber optic (serat fiber) untuk koneksi regular downstream, main datacenter dan jaringan seluruh perangkat daerah berupa paket FO International sebesar 3000 Mbps. Dan untuk backup koneksi jaringan seluruh perangkat daerah menggunakan paket internet Fiber Optik Internet Dedicated Internasional 30 Mbps, HSI Bisnis 50 Mbps, HSI Bisnis 100 Mbps, HSI Bisnis 200

Mbps dan HSI Bisnis 300 Mbps. Sedangkan di tahuh 2025 untuk backup koneksi internet data center menggunakan paket IP Transit MIX 1000 Mbps.

Jalur internet dan intranet berada pada seluruh Perangkat Daerah, kantor uptd (pertanian,pupr,pendidikan),PKM, dan 20 Desa Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang dengan total seluruhnya sebanyak 152 titik terhubung dengan akses VPN Fiber Optic menggunakan internet dedicated dengan metode bandwidth sharing.

- Hotspot tempat publik

  Titik point *Hotspot free* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan untuk tempat publik ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Alun-Alun Nganjuk dan objek wisata,Desa RTH, dan pintu air/DAM.

- Hardware
  - *Access Point*

    Dinas Komunikasi dan Informatika menempatkan *access point* di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk masing-masing Perangkat Daerah penempatan dan pengelolaan *access point* yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
  - *Router*

    Dinas komunikasi dan Informasi membangun akses internal data kependudukan di 20 (Dua Puluh) Kecamatan yang terpusat di Dukcapil untuk pengelolaan data centre, dan integrasi jaringan CCTV serta pengelolaan internet di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - *Switch/ Switch HUB*

    Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat jaringan komputer, disediakan *Switch* yang menghubungkan beberapa perangkat di Dinas

Komunikasi dan Informatika.

- *Network Tool Kit*

  Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer, didukung dengan peralatan jaringan antara lain: Ceplicer 2 unit dan ORDR 2 unit.

- *Server*

  Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 27 unit *server* yang dipergunakan untuk aplikasi e-government di Pemerintah Kabupaten Nganjuk termasuk untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- *CCTV*

  Kamera dan alat perekamnya dipergunakan untuk pemantauan situasi sekitar Sekretriat Daerah Kabupaten Nganjuk yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan di sekitar area Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berjumlah 235 unit. CCTV juga dibangun di jalan-jalan utama Kabupaten Nganjuk, area publik, Sungai dan Desa untuk memantau lalulintas dan keamanan terhubung dengan Comand Center dan Kepolisian Resort Nganjuk.

e) Aplikasi (Perangkat Lunak)

- Sistem operasi (Windows, Linux)

  Sistem operasi yang digunakan untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft Windows sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan diterapkan *free open souce system*. Hal ini sesuai dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau *open source*.

- Anti Virus

  Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat pembaruan dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan pembaruan antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat komputer di lingkup Pemerintah telah mengimplementasikan pengamanan dengan anti virus.

- Virtual Machine (VM)

  Virtual machine (VM) yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah bagian dari infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN). PDN dibangun untuk menyediakan layanan komputasi awan (cloud) dan bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan tata kelola data pemerintah melalui VM. VM digunakan sebagai fasilitasi penyimpanan data bagi berbagai Perangkat Daerah.

f) Media komunikasi

Untuk menjalankan fungsi sebagai komunikator pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola sarana media komunikasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk meliputi:

- Media penyiaran

  Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola media penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu Radio Suara Ajuk Ladang (RSAL) melalui siaran frekuensi FM 105,3 FM dan siaran streaming internet.

- Media daring

  - Portal utama Pemerintah Kabupaten yang dinamakan Portal Informasi Nganjuk (PING) dengan alamat http://www.nganjukkab.go.id. memproduksi informasi sebanyak 11 konten tiap hari berupa konten artikel, berita foto, berita video. Seluruh 52 portal Perangkat Daerah serta 264 portal desa dan 20 portal kelurahan telah terintegrasi dengan portal PING, membentuk jejaring informasi yang disebut Jejaring Informasi Anjuk Ladang (JIAL). JIAL telah menjadi rujukan masyarakat pencari informasi maupun wartawan media massa menerbitkan berita, keseluruhan media komunikasi yang tercantum dalam daftar sebagai berikut:

No	Instansi	Alamat Portal
1	Pemkab Nganjuk	https://www.nganjukkab.go.id
2	Inspektorat Daerah	https://inspektorat.nganjukkab.go.id
3	Sekretariat DPRD	https://www.dprdnganjukkab.go.id
4	BAPPEDA	https://bappeda.nganjukkab.go.id
5	BPKAD	http://bpkad.nganjukkab.go.id
6	BAPENDA	https://bapenda.nganjukkab.go.id
7	BKPSDM	https://bkd.nganjukkab.go.id
8	BPBD	http://bpbd.nganjukkab.go.id
9	Dinas Pendidikan	http://dispendik.nganjukkab.go.id
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	https://disporabudpar.nganjukkab.go.id
11	Dinas Kesehatan	https://dinkes.nganjukkab.go.id
12	Dinas Sosial dan PPPA	http://dinsospppa.nganjukkab.go.id
13	Dinas PPKB	http://dppkb.nganjukkab.go.id
14	Dinas PMD	http://pmd.nganjukkab.go.id
15	Dinas P M P T S P	https://dpmptsp.nganjukkab.go.id
16	Disperindag	http://indag.nganjukkab.go.id
17	Dinas Tenaga Kerja	http://disnaker.nganjukkab.go.id
18	Diskominfo	https://diskominfo.nganjukkab.go.id
19	Dinas PUPR	http://pupr.nganjukkab.go.id
20	Dishub	http://dishub.nganjukkab.go.id
21	Dinas PRKPP	http://prkpp.nganjukkab.go.id
22	Dinas LH	http://dlh.nganjukkab.go.id
23	Dinas Pertanian	http://disperta.nganjukkab.go.id
24	Dispendukcapil	https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id
25	Dinas KPP	http://kpp.nganjukkab.go.id
26	Dinas ARPUS	http://arpus.nganjukkab.go.id
27	SatPol PP	http://polpp.nganjukkab.go.id
28	RSUD Nganjuk	https://rsud.nganjukkab.go.id
29	RSUD Kertosono	https://rsudkertosono.nganjukkab.go.id
30	Kecamatan Bagor	https://bagor.nganjukkab.go.id
31	Kecamatan Baron	https://baron.nganjukkab.go.id
32	Kec. Berbek	https://berbek.nganjukkab.go.id
33	Kec. Gondang	http://gondang.nganjukkab.go.id
34	Kec. Jatikalen	http://jatikalen.nganjukkab.go.id
35	Kec. Kertosono	http://kertosono.nganjukkab.go.id
36	Kec. Lengkong	https://lengkong.nganjukkab.go.id
37	Kec. Loceret	https://loceret.nganjukkab.go.id
38	Kec. Nganjuk	http://nganjuk.nganjukkab.go.id
39	Kec. Ngetos	http://ngetos.nganjukkab.go.id
40	Kec. Ngluyu	http://ngluyu.nganjukkab.go.id
41	Kec. Ngronggot	http://ngronggot.nganjukkab.go.id
42	Kec. Pace	http://pace.nganjukkab.go.id
43	Kec. Patianrowo	http://patianrowo.nganjukkab.go.id
44	Kec. Prambon	http://prambon.nganjukkab.go.id

No	Instansi	Alamat Portal
45	Kec. Rejoso	http://rejoso.nganjukkab.go.id
46	Kec. Sawahan	http://sawahan.nganjukkab.go.id
47	Kec. Sukomoro	http://sukomoro.nganjukkab.go.id
48	Kec.Tanjunganom	http://tanjunganom.nganjukkab.go.id
49	Kec. Wilangan	http://wilangan.nganjukkab.go.id
50	Bareng	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/bareng
51	Bendolo	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/bendolo
52	Duren	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/duren
53	Kebonagung	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/kebonagung
54	Margopatut	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/margopatut
55	Ngliman	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/ngliman
56	Sawahan	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/sawahan
57	Sidorejo	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/sidorejo
58	Siwalan	https://sawahan.nganjukkab.go.id/desa/siwalan
59	Blongko	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/blongko
60	Kepel	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/kepel
61	Klodan	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/klodan
62	Kuncir	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/kuncir
63	Kweden	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/kweden
64	Mojoduwur	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/mojoduwur
65	Ngetos	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/ngetos
66	Oro-Oro Ombo	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/orooroombo
67	Suru	https://ngetos.nganjukkab.go.id/desa/suru
68	Balongrejo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/balongrejo
69	Bendungrejo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/bendungrejo
70	Berbek	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/berbek
71	Bulu	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/bulu
72	Cepoko	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/cepoko
73	Grojogan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/grojogan
74	Kacangan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/kacangan
75	Maguan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/maguan
76	Mlilir	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/mlilir
77	Ngrawan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/ngrawan
78	Patranrejo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/patranrejo
79	Salamrojo	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/salamrojo
80	Semare	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/semare
81	Sendangbumen	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sendangbumen

No	Instansi	Alamat Portal
82	Sengkut	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sengkut
83	Sonopatik	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sonopatik
84	Sumberurip	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sumberurip
85	Sumberwindu	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/sumberwindu
86	Tiripan	https://berbek.nganjukkab.go.id/desa/tiripan
87	Bajulan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/bajulan
88	Candirejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/candirejo
89	Gejagan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/gejagan
90	Genjeng	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/genjeng
91	Godean	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/godean
92	Jatirejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/jatirejo
93	Karangsono	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/karangsono
94	Kenep	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/kenep
95	Kwagean	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/kwagean
96	Loceret	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/loceret
97	Macanan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/macanan
98	Mungkung	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/mungkung
99	Ngepeh	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/ngepeh
100	Nglaban	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/nglaban
101	Patihan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/patihan
102	Putukrejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/putukrejo
103	Sekaran	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/sekaran
104	Sombron	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/sombron
105	Sukorejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/sukorejo
106	Tanjungrejo	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/tanjungrejo
107	Tekenglagahan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/tekenglagahan
108	Tempelwetan	https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/tempelwetan
109	Babadan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/babadan
110	Banaran	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/banaran
111	Batembat	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/batembat
112	Bodor	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/bodor
113	Cerme	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/cerme
114	Gemenggeng	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/gemenggeng
115	Gondang	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/gondang
116	Jampes	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/jampes
117	Jatigreges	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/jatigreges

No	Instansi	Alamat Portal
118	Jetis	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/jetis
119	Joho	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/joho
120	Kecubung	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/kecubung
121	Kepanjen	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/kepanjen
122	Mlandangan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/mlandangan
123	Pacekulon	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/pacekulon
124	Pacewetan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/pacewetan
125	Plosoharjo	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/plosoharjo
126	Sanan	https://pace.nganjukkab.go.id/desa/sanan
127	Baleturi	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/baleturi
128	Bandung	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/bandung
129	Gondanglegi	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/gondanglegi
130	Kurungrejo	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/kurungrejo
131	Mojoagung	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/mojoagung
132	Nglawak	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/nglawak
133	Rowoharjo	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/rowoharjo
134	Sanggrahan	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/sanggrahan
135	Singkalanyar	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/singkalanyar
136	Sonoageng	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/sonoageng
137	Sugihwaras	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/sugihwaras
138	Tanjungtani	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/tanjungtani
139	Tegaron	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/tegaron
140	Watudandang	https://prambon.nganjukkab.go.id/desa/watudandang
141	Banjarsari	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/banjarsari
142	Betet	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/betet
143	Cengkok	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/cengkok
144	Desa Dadapan	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/dadapan
145	Juwet	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/juwet
146	Kalianyar	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/kalianyar
147	Kaloran	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/kaloran
148	Kelutan	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/kelutan
149	Klurahan	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/klurahan
150	Mojokendil	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/mojokendil
151	Ngronggot	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/ngronggot
152	Tanjungkalang	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/tanjungkalang

No	Instansi	Alamat Portal
153	Trayang	https://ngronggot.nganjukkab.go.id/desa/trayang
154	Banaran	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/banaran
155	Bangsri	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/bangsri
156	Drenges	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/drenges
157	Juwono	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/juwono
158	Kalianyar	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kalianyar
159	Kepuh	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kepuh
160	Kudu	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kudu
161	Kutorejo	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/kutorejo
162	Lambangkuning	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/lambangkuning
163	Nglawak	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/nglawak
164	Pandantoyo	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/pandantoyo
165	Pelem	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/pelem
166	Tanjung	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/tanjung
167	Tembarak	https://kertosono.nganjukkab.go.id/desa/tembarak
168	Babadan	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/babadan
169	Bukur	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/bukur
170	Lestari	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/lestari
171	Ngepung	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/ngepung
172	Ngrombot	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/ngrombot
173	Pakuncen	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/pakuncen
174	Patianrowo	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/patianrowo
175	Pecuk	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/pecuk
176	Pisang	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/pisang
177	Rowomarto	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/rowomarto
178	Tirtobinangun	https://patianrowo.nganjukkab.go.id/desa/tirtobinangun
179	Baron	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/baron
180	Garu	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/garu
181	Gebangkerep	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/gebangkerep
182	Jambi	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/jambi
183	Jekek	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/jekek
184	Katerban	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/katerban
185	Kemaduh	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/kemaduh
186	Kemlokolegi	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/kemlokolegi
187	Mabung	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/mabung

No	Instansi	Alamat Portal
188	Sambiroto	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/sambiroto
189	Waung	https://baron.nganjukkab.go.id/desa/waung
190	Tanjunganom	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/tanjunganom
191	Warujayeng	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/warujayeng
192	Banjaranyar	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/banjaranyar
193	Demangan	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/demangan
194	Getas	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/getas
195	Jogomerto	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/jogomerto
196	Kampungbaru	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/kampungbaru
197	Kedungombo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/kedungombo
198	Kedungrejo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/kedungrejo
199	Malangsari	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/malangsari
200	Ngadirejo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/ngadirejo
201	Sambirejo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sambirejo
202	Sidoharjo	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sidoharjo
203	Sonobekel	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sonobekel
204	Sumberkepuh	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/sumberkepuh
205	Wates	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/desa/wates
206	Kapas	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/kapas
207	Sukomoro	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/sukomoro
208	Bagorwetan	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/bagorwetan
209	Blitaran	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/blitaran
210	Bungur	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/bungur
211	Kedungsoko	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/kedungsoko
212	Nglundo	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/nglundo
213	Ngrami	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/ngrami
214	Ngrengket	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/ngrengket
215	Pehserut	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/pehserut
216	Putren	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/putren
217	Sumengko	https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/sumengko
218	Begadung	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/begadung
219	Bogo	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/bogo

No	Instansi	Alamat Portal
220	Cangkringan	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/cangkringan
221	Ganungkidul	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/ganungkidul
222	Jatirejo	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/jatirejo
223	Kartoharjo	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kartoharjo
224	Kauman	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kauman
225	Kramat	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kramat
226	Mangundikaran	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/mangundikaran
227	Payaman	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/payaman
228	Ploso	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/ploso
229	Ringinanom	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/ringinanom
230	Werungotok	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/werungotok
231	Balongpacul	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/balongpacul
232	Kedungdowo	https://nganjuk.nganjukkab.go.id/desa/kedungdowo
233	Guyangan	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/guyangan
234	Kedondong	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/kedondong
235	Bagorkulon	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/bagorkulon
236	Balongrejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/balongrejo
237	Banarankulon	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/banarankulon
238	Banaranwetan	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/banaranwetan
239	Buduran	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/buduran
240	Gandu	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/gandu
241	Gemenggeng	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/gemenggeng
242	Girirejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/girirejo
243	Karangtengah	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/karangtengah
244	Kendalrejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/kendalrejo
245	Kerepkidul	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/kerepkidul
246	Kutorejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/kutorejo
247	Ngumpul	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/ngumpul
248	Paron	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/paron
249	Pesudukuh	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/pesudukuh
250	Petak	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/petak
251	Sekarputih	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/sekarputih
252	Selorejo	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/selorejo
253	Sugihwaras	https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/sugihwaras
254	Mancon	https://wilangan.nganjukkab.go.id/desa/mancon

No	Instansi	Alamat Portal
255	Ngadipiro	https://wilangan.nganjukkab.go.id/desa/ngadipiro
256	Ngudikan	https://wilangan.nganjukkab.go.id/desa/ngudikan
257	Sudimoroharjo	https://wilangan.nganjukkab.go.id/desa/sudimoroharjo
258	Sukoharjo	https://wilangan.nganjukkab.go.id/desa/sukoharjo
259	Wilangan	https://wilangan.nganjukkab.go.id/desa/wilangan
260	Banjarejo	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/banjarejo
261	Bendoasri	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/bendoasri
262	Gempol	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/gempol
263	Jatirejo	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/jatirejo
264	Jintel	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/jintel
265	Kedungpadang	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/kedungpadang
266	Klagen	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/klagen
267	Mlorah	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/mlorah
268	Mojorembun	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/mojorembun
269	Mungkung	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/mungkung
270	Musirkidul	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/musirkidul
271	Musirlor	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/musirlor
272	Ngadiboyo	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/ngadiboyo
273	Ngangkatan	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/ngangkatan
274	Puhkerep	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/puhkerep
275	Rejoso	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/rejoso
276	Sambikerep	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/sambikerep
277	Setren	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/setren
278	Sidokare	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/sidokare
279	Sukorejo	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/sukorejo
280	Talang	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/talang
281	Talun	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/talun
282	Tritik	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/tritik
283	Wengkal	https://rejoso.nganjukkab.go.id/desa/wengkal
284	Balonggebang	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/balonggebang
285	Campur	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/campur
286	Gondangkulon	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/gondangkulon
287	Jaan	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/jaan
288	Karangsemi	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/karangsemi
289	Kedungglugu	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/kedungglugu
290	Ketawang	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/ketawang

No	Instansi	Alamat Portal
291	Losari	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/losari
292	Mojoseto	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/mojoseto
293	Nglinggo	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/nglinggo
294	Ngujung	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/ngujung
295	Pandean	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/pandean
296	Sanggrahan	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/sanggrahan
297	Senggowar	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/senggowar
298	Senjayan	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/senjayan
299	Sumberagung	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/sumberagung
300	Sumberjo	https://gondang.nganjukkab.go.id/desa/sumberjo
301	Bajang	https://ngluyu.nganjukkab.go.id/desa/bajang
302	Gampeng	https://ngluyu.nganjukkab.go.id/desa/gampeng
303	Lengkonglor	https://ngluyu.nganjukkab.go.id/desa/lengkonglor
304	Ngluyu	https://ngluyu.nganjukkab.go.id/desa/ngluyu
305	Sugihwaras	https://ngluyu.nganjukkab.go.id/desa/sugihwaras
306	Tempuran	https://ngluyu.nganjukkab.go.id/desa/tempuran
307	Balongasem	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/balongasem
308	Banggle	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/banggle
309	Banjardowo	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/banjardowo
310	Jatipunggur	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/jatipunggur
311	Jegreg	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/jegreg
312	Kedungmlaten	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/kedungmlaten
313	Ketandan	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/ketandan
314	Lengkong	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/lengkong
315	Ngepung	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/ngepung
316	Ngringin	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/ngringin
317	Pinggir	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/pinggir
318	Prayungan	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/prayungan
319	Sawahan	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/sawahan
320	Sumberkepuh	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/sumberkepuh
321	Sumbermiri	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/sumbermiri
322	Sumbersono	https://lengkong.nganjukkab.go.id/desa/sumbersono
323	Begendeng	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/begendeng
324	Dawuhan	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/dawuhan
325	Dlururejo	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/dlururejo
326	Gondangwetan	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/gondangwetan

No	Instansi	Alamat Portal
327	Jatikalen	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/jatikalen
328	Lumpangkuwik	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/lumpangkuwik
329	Munung	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/munung
330	Ngasem	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/ngasem
331	Perning	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/perning
332	Pule	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/pule
333	Pulowetan	https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/pulowetan

- Website Electronic Procurement yaitu https://lpse.nganjukkab.go.id

- Media sosial

  Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk dan mengelola media sosial meliputi:

  - Fecebook dengan alamat https://www.facebook.com/dinas.kominfonganjuk.
  - Instagram dengan dengan alamat https://www.instagram.com/kominfonganjuk
  - Youtube dengan alamat https://www.youtube.com/c/DiskominfoKabNganjuk

- Media luar ruang

  Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan media luar ruang, meliputi:

  - baliho sebanyak 20 (dua puluh) buah yang berada di seluruh kecamatan;
  - Videotron sebanyak 2 (dua) unit di Pasar Lengkong dan di Jalan Gatot Subroto Nganjuk, yang dapat menampilkan konten informasi berbentuk video, gambar, chat, diagram atau konten visual lainnya;
  - Mobil layanan informasi sebanyak 2 (dua) unit;
  - Billboard sebanyak 3 (tiga) unit.

3) Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selain dari APBD Kabupaten Nganjuk, juga berpotensi mendapat

pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) dan APBN (melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

4) Sumber Daya Jaringan Kerja

Perluasan jaringan kerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk secara formal ditempuh melalui:

- Saluran vertikal, yaitu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI maupun dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur;
- Kemitraan, yaitu dengan Lembaga Penyiaran Publik yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Kesenian Tradisional, Pewarta dan dunia usaha serta organisasi nirlaba yang bergerak di sektor komunikasi dan informatika;
- Jejaring Informasi Anjuk Ladang, yaitu wadah bagi pengelola/ administrator media komunikasi 52 perangkat daerah, 264 desa, dan 20 kelurahan untuk bekerjasama melalui penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Diskominfo Kabupaten Nganjuk

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target IKK	Target Renstra Dinas Kominfo					Realisasi Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Nilai Indeks SPBE	√		2,6	2,6	2,6	3,5	2,5	2,62	2,14	2,18	3,62	3,84
2	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	√		-	-	-	-	7%	-	-	-	-	7%
3	Persentase Aplikasi e-Government yang terhubung dengan jaringan	√		90%	90%	-	-	-	92%	94,05 %	-	-	-
4	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	√		85%	90%	-	-	-	100%	71%	-	-	-
5	Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi	√		-	-	100%	100%	-	-	-	98,85%	100%	-
6	Persentase Perangkat daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman	√		-	-	100%	100%	-	-	-	98%	100%	-
7	Persentase PD berpredikat “Menuju Informatif” dalam keterbukaan informasi publik	√		-	-	13%	25%	-	-	-	7%	90%	-
8	Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala	√		-	-	60%	80%	-	-	-	100%	100%	-
9	Nilai Aspek TIK		√	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,67
10	Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka		√	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target IKK	Target Renstra Dinas Kominfo					Realisasi Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
11	Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk		√	-	-	-	-	60	-	-	-	-	87,09

Evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Analisis ini menjadi dasar penting dalam penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur, selaras dengan kebijakan, serta dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Berikut analisis capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Nilai Indeks SPBE

   Capaian nilai Indeks SPBE selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai tercatat 2,62, namun mengalami penurunan pada 2021–2022 menjadi 2,14 dan 2,18. Meskipun demikian, upaya perbaikan tata kelola SPBE melalui penguatan arsitektur SPBE, integrasi aplikasi umum, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah membuahkan hasil dengan capaian 3,62 di tahun 2023 dan 3,84 di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa strategi peningkatan kualitas layanan digital pemerintah berjalan efektif. Ke depan, target indikator ini perlu ditetapkan secara lebih progresif dengan mempertimbangkan tren peningkatan dan kesiapan perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital. Di tahun 2020 hingga 2023 indikator ini tidak diterapkan karena merupakan indikator baru yang sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.

2. Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang

   Capaian kinerja untuk Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (Kampung Dial) sesuai dengan terget yang ditetapkan, program berjalan sesuai rencana namun masih terbatas pada beberapa desa percontohan, sehingga perlu perluasan implementasi di periode berikutnya dan indikator ini baru diterapkan pada tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026. Di tahun 2020 hingga 2023 indikator ini tidak diterapkan karena merupakan indikator baru yang sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.

3. Persentase Aplikasi e-Government yang terhubung dengan jaringan

   Capaian kinerja untuk Persentase Aplikasi e-Goverment yang terhubung dengan Jaringan dengan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan, hal ini mencerminkan keberhasilan integrasi jaringan dan optimalisasi infrastruktur TIK di seluruh OPD. Namun di tahun 2022 dan 2023 tidak lagi diterapkan sedangkan di tahun 2024 sudah mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.
4. Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik

   Capaian kinerja untuk Persentase OPD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 sangat baik, seluruh OPD menerapkan keterbukaan informasi, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 71%, kemungkinan akibat perubahan mekanisme penilaian atau ketidaklengkapan pemenuhan standar keterbukaan informasi publik pada beberapa OPD. Perlu adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan konsistensi keterbukaan infomasi, namun dalam Renstra Tahun 2018-2023 indikator ini tidak lagi diterapkan di tahun 2022 dan 2023 sedangkan di tahun 2024 sudah mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.
5. Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi

   Capaian kinerja Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi mendekati sempurna pada 2022 dan mencapai 100% di tahun 2023, menandakan transformasi digital layanan publik berjalan optimal dan semua layanan kunci telah terintegrasi secara elektronik. Namun dalam Renstra Tahun 2018-2023 indikator ini pada tahun 2020 hingga 2021 tidak diterapkan sedangkan di tahun 2024 sudah mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.
6. Persentase Perangkat daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman

   Capaian kinerja untuk Persentase Perangkat Daerah Terlayani Infrastruktur Jaringan yang Andal dan Aman pada tahun 2022 hampir semua perangkat daerah sudah terlayani jaringan, dan pada 2023 telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas jaringan dan perluasan layanan TIK yang signifikan. Namun dalam Renstra Tahun 2018-2023 indikator ini pada tahun 2020 hingga 2021 tidak diterapkan sedangkan di

tahun 2024 sudah mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan Tahun Renstra 2024-2026.

7. Persentase PD berpredikat “Menuju Informatif” dalam keterbukaan informasi publik

   Capaian kinerja untuk Persentase PD Berpredikat “Menuju Informatif” awalnya realisasi sangat rendah pada tahun 2021, namun mengalami lompatan besar di tahun 2023 menjadi 90%. Hal ini mencerminkan keberhasilan pendampingan, monitoring, dan pembinaan keterbukaan informasi publik secara masif di OPD. Namun dalam Renstra 2018-2023 indikator ini pada tahun 2020 hingga 2021 tidak diterapkan sedangkan di tahun 2024 sudah mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.

8. Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala

   Capaian kinerja untuk Persentase OPD yang Melakukan Update Metadata Minimal 80% realiasai jauh melampaui tareget, hal ini menunjukkan komitmen OPD dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dengan rutin memperbarui metadata. Namun dalam Renstra Tahun 2018-2023 indikator ini pada tahun 2020 hingga 2021 tidak diterapkan sedangkan di tahun 2024 sudah mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.

9. Nilai Aspek TIK

   Indikator Nilai Aspek TIK ditargetkan 2,00, namun capaian tahun 2024 masih berada pada angka 1,67 sehingga belum memenuhi target. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan pada ketersediaan infrastruktur TIK, kualitas SDM pengelola, dan tingkat adopsi sistem informasi di perangkat daerah. Untuk memperbaiki capaian ini, diperlukan rencana aksi percepatan berupa pengadaan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital bagi aparatur, dan integrasi sistem informasi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, diharapkan target 2,00 dapat dicapai pada periode mendatang. Namun pada tahun 2020 hingga 2023 indikator kinerja kunci ini tidak diterapkan dikarenakan pada Renstra tahun 2018-2023 tidak mencantumkan indikator kunci.

10. Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

    Target kematangan layanan data terbuka pada tahun 2024 adalah 2, namun realisasi justru mencapai angka 4 yang berarti

jauh melampaui target. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, penguatan portal data terbuka, dan keterlibatan aktif perangkat daerah dalam menyediakan data berkualitas. Untuk periode berikutnya, target perlu dinaikkan secara realistis agar tetap menjadi pendorong peningkatan kualitas data, sekaligus mempertahankan konsistensi keterbukaan informasi pemerintah daerah. Namun pada tahun 2020 hingga 2023 indikator kinerja kunci ini tidak diterapkan dikarenakan pada Renstra tahun 2018-2023 tidak mencantumkan indikator kunci.

11. Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk
    Target skor keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 sebesar 60 berhasil dilampaui dengan capaian 87,09, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan informasi publik telah berada pada kategori “informatif”. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh optimalisasi peran PPID utama dan pembantu, penguatan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta pemanfaatan media digital untuk diseminasi informasi publik. Target ke depan perlu disesuaikan agar tetap menantang, misalnya mengarahkan pada upaya mempertahankan atau meningkatkan predikat “informatif” secara nasional, sekaligus memperluas jangkauan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun pada tahun 2020 hingga 2023 indikator kinerja kunci ini tidak diterapkan dikarenakan pada Renstra tahun 2018-2023 tidak mencantumkan indikator kunci.

Data capaian kinerja sebagaimana tabel 2.1.6 di atas diperoleh dari sumber :

1. Data Nilai indeks SPBE merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB terhadap semua instansi pusat dan Daerah;
2. Data Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang diperoleh dari Laporan Kampung Digital Anjuk Ladang disertakan regulasi yang telah ditetapkan;
3. Nilai Aspek TIK diperoleh dari Nilai Indeks SPBE;
4. Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka diperoleh dari hasil penilaian terhadap implementasi layanan data terbuka yang dilakukan berdasarkan standar Satu Data Indonesia dan SPBE

5. Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur setiap tahun

Tabel 2.1.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.019.251.104	6.517.313.942	5.967.700.000	5.528.421.750	0	0	91,85	-	-	(6.568.865.046)	(5.528.421.750)
Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.249.810.800	2.297.000.000	2.503.000.000	2.069.653.250	0	0	91,99	-	-	(2.043.810.800)	(2.069.653.250)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.357.904.941	17.900.000.000	21.600.000.000	13.870.660.133	0	0	96,61	-	-	(10.657.904.941)	(13.870.660.133)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	502.403.000	600.000.000	700.000.000	496.065.450	0	0	98,74	-	-	(402.403.000)	(496.065.450)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	800.696.000	350.000.000	400.000.000	741.924.858	0	0	92,66	-	-	(750.696.000)	(741.924.858)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio antara anggaran dan realisasi rata-rata 94,37% di tahun 2024 kemudian di tahun 2025, 2026 belum terlaksana mengingat tahun 2024 merupakan tahun awal dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang tertera dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

d. Kelompok Sasaran Layanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1) Internal, yakni perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa.
2) Eksternal, yakni masyarakat umum, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah, instansi vertikal.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1) Mitra Internal Pemerintah Daerah
   - **Sekretariat Daereah**, terutama Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam mendukung kebijakan informasi publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola Pemerintahan digital.
   - Bappeda, sebagai mitra perencanaan pembangunan yang memastikan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selaras dengan RPJMD atau RPD.
   - BPKAD, mendukung penganggaran, belanja TIK, dan pengelolaan aset.
   - BKPSDM, sebagai mitra pengembangan kompetensi ASN bidang TIK, sertifikasi, formasi SDM pengelola layanan.
   - Seluruh Perangkat Daerah, sebagai penggunan layanan aplikasi, data, jaringan internet, layanan informasi publik, serta objek koordinasi statistik sektoral
2) Mitra Eksternel Pemerintah daerah
   - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, literasi digital, dan penyediaan aplikasi umum Pemerintahan Digital.

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam penguatan keamanan siber dan manajemen insiden keamanan informasi.
- Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai mitra koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral dan penyediaan data strategis.
- Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur, untuk sinkronisasi program, integrasi jaringan intra-pemerintah, serta pengelolaan TIK dan layanan informasi publik.

3) Mitra Masyarakat dan Komunitas
   - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan.
   - Media Massa (Cetak, Elektronik, Online), sebagai mitra dalam publikasi berita, diseminasi informasi, dan klarifikasi hoaks.

2.2 Permaslahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dengan demikian, realisasi kinerja yang belum mencapai target pada periode perencanaan menjadi sumber rumusan permasalahan.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan sektor komunikasi dan informatika, berbagai aspirasi telah disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Pertama, dari unsur Disdukcapil disampaikan bahwa layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) membutuhkan dukungan akses internet yang aman, tertutup, dan terjamin stabilitasnya. Hal ini dipandang penting mengingat adanya larangan penggunaan jaringan internet umum untuk SIAK, sementara di beberapa kecamatan masih terdapat pemanfaatan jaringan terbuka.

Selanjutnya, dari unsur perguruan tinggi diusulkan agar penyusunan rencana pembangunan tidak hanya melibatkan perangkat daerah atau lembaga pemerintah, namun juga

mengikutsertakan perguruan tinggi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Masukan berikutnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Berdasarkan survei, lulusan SMK/SMA masih menghadapi keterbatasan keterampilan TIK yang memadai. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM digital melalui program peningkatan kompetensi, investasi di bidang TIK, serta mendorong keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran.

Selain itu, terdapat aspirasi mengenai pentingnya pengembangan situs web informasi yang mengangkat potensi sejarah dan ekologi daerah. Hal ini dinilai relevan untuk menjaga kelestarian budaya serta memudahkan pemantauan terhadap objek-objek bersejarah dan ekologis melalui dukungan teknologi informasi.

Terakhir, apresiasi juga diberikan atas peran Dinas Kominfo dalam memfasilitasi siswa SMK untuk melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL). Kehadiran program tersebut dinilai sangat membantu dalam pengembangan kompetensi siswa sekaligus mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis digital di daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika selama 5 tahun (2025-2029), maka dapat diidentifikasi permasalahan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK 2. Terbatasnya jumlah dan mutu SDM TIK 3. Dukungan kebijakan belum optimal - Perda Pemdi belum tersedia - Perda Keterbukaan Informasi Publik belum tersedia	12. Penyediaan jaringan internet belum terintegrasi di Diskominfo 13. Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN 14. Belum optimalnya pengelolaan data daerah 15. Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik secara optimal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya manusia dan infrastuktur TIK. Selain itu, dukungan kebijakan penerapan Pemerintah Digital belum optimal dalam hal ini belum adanya perda yang mengatur pelaksanaan Pemerintah Digital. Hal-hal tersebut berdampak belum optimalnya pencapaian nilai indeks Pemerintah Digital. Permasalahan yang lain adalah belum tersedianya jaringan komunikasi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk sehingga masih ada daerah blank spot atau susah sinyal.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengelolaan program aplikasi adalah pengelolalaan audit aplikasi belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian penilaian Indeks Pemerintah Digital yang berkaitan dengan audit aplikasi.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia masih kurang. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas.

Apabila ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

B. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Renstra Kemenkomdigi Tahun 2025-2029 memiliki visi Mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan konektivitas digital yang merata, aman, dan berkelanjutan.

Adapun Misi Kementerian Komunikasi danInformatika antara lain:

- ✓ Memperkuat infrastruktur TIK Nasional;
- ✓ Mengembangkan ekosiste digital yang inklusif dan berkelanjutan;
- ✓ Meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan TIK yang produktif;
- ✓ Mewujudkan tata kelola TIK yang baik dan akuntabel.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya konektivitas digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia;
2. Tumbuhnya ekonomi digital yang inklusif dan berikelanjutan;
3. Meningkatnya literasi digital dan pemanfaatan TIK yang produktif oleh masyarakat;
4. Terwujudnya tata kelola TIK yang baik dan akuntabel;

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya konektivitas digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.	1. Infrastruktur jaringan TIK belum memadai 2. Adanya kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	1. Kebijakan daerah tentang layanan komunikasi dan informatika belum ada 2. Masih kurangnya Kompetensi SDM tentang pemanfaatan TIK.	1. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Adanya komitmen

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Tumbuhnya ekonomi digital yang inklusif dan berikelanjutan	Infrastruktur jaringan TIK belum merata	3. Masih kurangnya Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas	untuk mewujudkan smart Kabupaten
3. Meningkatnya literasi digital dan pemanfaatan TIK	Implementasi SOP tentang tatakelola informasi internal belum terselenggara		
4. Terwujudnya tata kelola TIK yang baik dan akuntabel	Sistem aplikasi e-government belum terintegrasi		

A. Telahaan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Adapun arah kebijakan BSSN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan/peningkatan kemampuan sektor administrasi pemerintahan dalam mengidentifikasi konteks bisnis, sumber daya, dan risiko yang mendukung penyelenggaraan IIV.
2. Pemenuhan/peningkatan kemampuan sektor administrasi pemerintahan dalam mencegah, membatasi, atau menahan dampak dari ancaman ada/atau insiden siber.
3. Pemenuhan/peningkatan kemampuan sektor administrasi Pemerintahan dalam memantau secara tepat waktu terjadinya peristiwa siber.
4. Pemerintahan/peningkatan kemampuan sektor administrasi pemerintahan dalam tindakan terkait penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

Untuk mendukung arah kebijakan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan BSSN 2025-2029, yaitu:

1. Penyelenggara IIV sektor administrasi pemerintahan mampu menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur perlindungan IIV;
2. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menilai dan mengelola risiko keamanan siber;
3. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu mengelola risiko rantai pasok;
4. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan

mampu melindungi aset visik;

5. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu melindungi aplikasi;
6. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu melindungi sumber daya manusia;
7. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menganalisis anomali dan Peristiwa Siber;
8. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu memantau Peristiwa Siber berkelanjutan;
9. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menyusun perencanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
10. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menganalisis dan melaporkan Insiden Siber;
11. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu meningkatkan keamanan setelah terjadinya Insiden Siber.

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2
Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Sasaran Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Strategis Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Penyelenggara IIV sektor administrasi pemerintahan mampu menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur perlindungan IIV; **2.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menilai dan mengelola risiko keamanan siber; **3.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu mengelola risiko rantai pasok; **4.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu melindungi aset visik; **5.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu melindungi aplikasi; **6.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu melindungi sumber daya manusia; **7.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menganalisis anomali dan Peristiwa Siber;	Rendahnya standar, keterbatasan SDM, infrastruktur, serta budaya keamanan siber	kurangnya sumber daya (SDM, anggaran, regulasi tegas)	danya kebijakan nasional, dukungan pimpinan, teknologi baru, dan meningkatnya kesadaran akibat ancaman nyata

Sasaran Strategis Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
8. Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu memantau Peristiwa Siber berkelanjutan; **9.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menyusun perencanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; **10.** Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu menganalisis dan melaporkan Insiden Siber; Penyelenggara IIV pada sektor administrasi pemerintahan mampu meningkatkan keamanan setelah terjadinya Insiden Siber.			

B. Telahaan Badan Pusat Statistik (BPS)

Adapun Tujuan Strategis BPS Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan *inssights* untuk penguatan kebijakan nasional melalui penyediaan statistik berkualitas berbasis teknologi adaptif;
2. Mewujudkan citra kelembagaan BPS yang kuat;
3. Mewujudkan kelembagaan statistik berkelas dunia yang didukung oleh SDM BeraAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan berdaya saing global (bertaraf internasional).

Tujuan Strategis BPS yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: Memberikan *inssights* untuk penguatan kebijakan nasional melalui penyediaan statistik berkualitas berbasis teknologi adaptif.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan BPS 2025-2029, yaitu:

1. Penguatan insight berdasarkan data statistik brkualitas sebagai dasar pembentukan kebijakan nasional;
2. Penguatan Citra Kelembagaan BPS;
3. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan.

Sasaran strategis BPS yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Pusat Statistik beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3
Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik

Sasaran Strategis Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan insight berdasarkan data statistik brkualitas sebagai dasar pembentukan kebijakan nasional	Proses bsinis ststistik masih memerlukan penguatan melalui integrasi dan modernisasi	a. Kurang maksimalnya ketersediaan Data umum pembangunan dan data spasial. b. Belum akuratnya data statistik	Adanya kebijakan satu data Indonesia dan kesadaran pentingnya data statistik sektoral

C. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Nganjuk dilakukan guna mengupayakan keterjangkauan dan ketersediaan informasi di seluruh wilayah Kabupaten dan mengusahakan pelayanan yang terintegrasi dan efisien. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041. Pengembangan sektor jaringan telekomunikasi diarahkan pada:

1. Penggunaan menara telekomunikasi bersama;
2. Pengembangan jaringan baru atau pengganti lama pada pusat sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.

b. Perumusan Isu Strategis

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penyusunan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi selanjutnya memperhitungkan lingkungan strategis, juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, hasil telaah terhadap terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik, dan Renstra Badan Sandi Negara, penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Nganjuk. Metode penentuan isu strategis dilakukan dengan metode Focus Group Discussion. Isu strategis pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kebutuhan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan TIK dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi;
2. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi pemerintahan;
3. Kebutuhan yang tinggi atas data yang lengkap, valid dan mutakhir;
4. Menguatnya kebutuhan masyarakat terhadap keamanan informasi.

Tabel 2.2.4
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
- **Infrastruktur Digital:** Ketersediaan jaringan fiber optik yang belum optimal di seluruh wilayah, potensi perluasan jaringan internet cepat - **Pemanfaatan TIK untuk Layanan Publik:** Potensi pengembangan aplikasi layanan digital	▪ Lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik ▪ Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK ▪ Terbatasnya jumlah dan mutu SDM TIK ▪ Dukungan kebijakan belum optimal - Perda Pemdi belum tersedia	Belum meratanya akses internet • Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam belum mencapai target • Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband belum mencapai target Proporsi individu yang	Penggunaan Teknologi ▪ Ketergantungan Terhadap Teknologi dan Sumber Daya ▪ Keamanan Siber dan Perlindungan Data ▪ Peran Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Ekonomi ▪ Inovasi Teknologi dalam	Pertahanan Keamanan - Penanggulanga Terorisme - Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara - Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara - Pemberantasa Narkoba	▪Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	▪ Tingginya kebutuhan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan TIK dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi; ▪ Tuntutan publik akan keterbukaan informasi pemerintahan; ▪ Kebutuhan yang tinggi atas data yang lengkap, valid dan mutakhir; ▪ Menguatnya kebutuhan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
terintegrasi, sistem informasi geografis untuk perencanaan, dan sistem pengaduan masyarakat daring - **Data dan Informasi:** Potensi pengelolaan dan pemanfaatan data daerah untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik	- Perda Keterbukaan Informasi Publik belum tersedia ▪ Penyediaan internet belum terintegrasi di Diskominfo ▪ Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN ▪ Belum optimalnya pengelolaan data daerah ▪ Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik secara optimal	menggunakan internet belum mencapai target	Sektor Kesehatan ▪ Privasi dan Pengawasan Digital			masyarakat terhadap keamanan informasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyadari peran strategis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendorong kemajuan Kabupaten Nganjuk, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam mendukung pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi Bupati Nganjuk **"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"** dan Misi ke-2 Bupati Nganjuk **"Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Efektif dan Efisien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan,"** maka ditetapkanlah Tujuan Strategis, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu beberapa tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 adalah: "**Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan."**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029:

1. **Meningkatkan Integrasi Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah;**
2. **Meningkatkan Keamanan Informasi Aptika Pemerintah Daerah;**
3. **Meningkatnya kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.**

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1. TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks pemerintah digital (PEMDI) (Indeks)	1.50	1.50	1.75	1.85	2.00	2.15	2.25	
		Meningkatkan Integrasi Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86.50	87	87	87	87	87	87	
			Persentase sistem layanan digital perangkat daerah yang terintegrasi (%)	3.59	4	6	8	10	12	14	
		Meningkatkan keamanan informasi Aptika Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Indeks)	440	647	670	690	710	730	750	
		Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.06	2.07	2.10	2.15	2.20	2.50	2.65	

3.2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi Renstra 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra Perangkat daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah.

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi, kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, strategi yang diterapkan dapat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi serta lebih efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan. Sesuai dengan tabel 3.2. yang menyajikan hubungan antara tujuan pembangunan, sasaran yang ditetapkan, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapainya.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi

VISI:	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	
MISI:	Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1.1 Meningkatkan Integrasi Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah	▪ Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital yang terintegrasi dan aman, berbasis satu data yang valid dan mutakhir; ▪ Pengembangan Standar dan Kebijakan Integrasi Data dan Layanan;

VISI:	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	
MISI:	Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1.2 Meningkatkan Keamanan Informasi Aptika Pemerintah Daerah	▪ Pembentukan Tim Keamanan Informasi Pemerintah Daerah; ▪ Penguatan Aspek Teknis Kemanan;
	1.3 Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	▪ Standarisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik; ▪ Pengembangan Sistem Informasi Statistik Sektoral Terintegrasi; ▪ Validasi dan Verifikasi Data Statistik Sektoral; ▪ Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Data.

Matriks strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam tabel di atas merupakan seperangkat rencana tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Selain itu, untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dan mencapai sasaran peningkatan integrasi sistem layanan digital, Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan prioritas pembangunan tahunan yang terstruktur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fondasi Digital untuk Tata Kelola yang Baik dan Transparan Akses Informasi yang Mudah dan Merata, Pelayanan Publik yang Efisien dan Akuntabel, Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data, Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat yang Lebih Luas, Pengawasan dan Akuntabel yang lebih ketat,	**Peningkatan Akuntabilitas dan Efisiensi melalui Digitalisasi Proses Bisnis** Strategi ini secara langsung mendukung dan meraupakan bagian internal dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Nganjuk. Digitalisasi menyediakan infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk	**Pemanfaatan Teknologi untuk Profesionalisme dan Efektivitas Kerja** Pemanfaatan Teknologi adalah instrumen krusial untuk mencapai misi Bupati Nganjuk dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Dengan mengadopsi teknologi secara cerdas dan terintegrasi,	**Penguatan Partisipasi Publik dan Transparansi melalui Platform Digital** penguatan partisipasi publik dan transparansi melalui platform digital berkontribusi pada Misi Bupati seperti mendukung penyelenggaraan Pemerintah yang aspiratif, mendorong	**Optimalisasi Ekosistem Digital untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** Optimalisasi ekosistem digital merujuk pada upaya terintegrasi untuk memaksimalkan pemanfaatan seluruh elemen digital agar bekerja secara sinergis dan efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
merupakan Fondasi Digital yang merujuk pada infrastruktur, sistem, dan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi (TI) yang handal, aman dan terintegrasi.	mentransformasi birokrasi dan meningkatkan kulaitas pelayanan publik yang prima, dan pembangunan daerah berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efektif, bersih, dan akuntabel. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih aspiratif, partisipatif, dan transparan, yang pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk	penyelenggaraan pememrintahan yang partisipatif, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, mendukung kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel.	baik. Strategi ini tidak hanya sekadar implementasi berbagai aplikasi, tetapi juga memastikan interoperabilitas, keamanan, keberlanjutan, dan kemudahan penggunaan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan mudah digunakan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan kinerja birokrasi secara signifikan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, partisipatif, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat

3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan panduan operasional bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara lebih rinci, arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3 di bawah ini memberikan gambaran komperhensif mengenai perencanaan dan

pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.3
teknik merumuskan arah kebijakan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 ▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 ▪ Peraturan Badan Siber dan sandi Negara Nomor 4 Tahun 2020 ▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 ▪ Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: B/66/PD.02/2025	▪ Percepatan Pembangunan Bidang Sosial (kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, melalui peningkatan akses hak-hak dasar masyarakat miskin atau termarjinalkan). ▪ Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Nganjuk ▪ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup. ▪ Penguatan Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Daerah. ▪ Percepatan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tatakelola yang Adaptif dan ASN yang Gesit (Agile)	▪ Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda ▪ Peningkatan Layanan Keamanan Informasi ▪ Peningkatan Integritas Layanan Publik dan Kepemerintahan ▪ Penyediaan rencana induk Pemerintah Digital dan memastikan pengimplementasian ▪ Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data Statistik Daerah ▪ Peningkatan Layanan Infra Struktur Dasar Center, Disaster Recovery Center dan TIK ▪ Peningkatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik yang terintegrasi ▪ Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City ▪ Peningkatan Layanan Manajemen data dan Informasi Elektronik Pemda	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   3) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
2) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pusat Data dan Informasi;

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

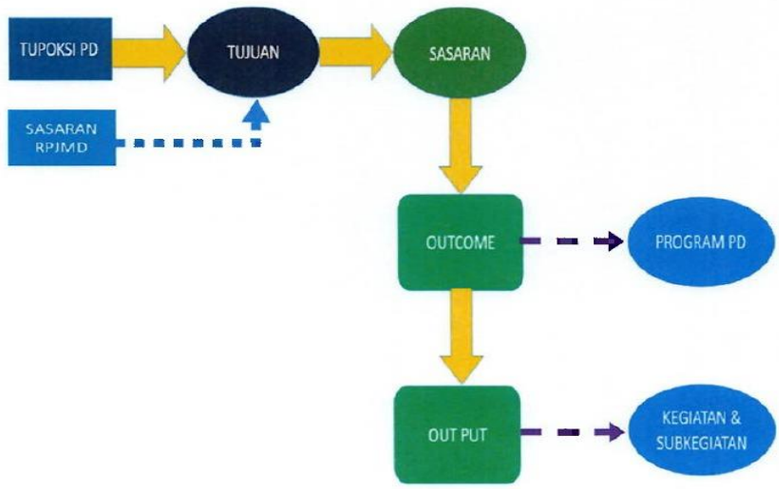
a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;

Gambaran kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk disajikan pada gambar 4.1 dan tabel sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Gambar 4.1 berikut menyajikan kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan logis antara mandat kelembagaan (tupoksi) dengan pencapaian kinerja pembangunan lima tahun mendatang.

Tujuan perangkat daerah pada gambar ini mencerminkan kinerja jangka menengah yang ingin dicapai selama lima tahun, dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. **Sasaran** merupakan tahapan atau milestone kinerja yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan, yang kemudian dijabarkan ke dalam outcome dan output. **Outcome** menggambarkan kondisi yang menunjukkan telah berfungsinya output, sedangkan **Output** adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya (manusia, anggaran, metode, material, dan alat).

Namun demikian, pada implementasinya, program, kegiatan, dan subkegiatan yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keterkaitan yang kuat dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Belum tergambarnya alur 'cascading' secara utuh dari tujuan–sasaran–outcome–output menjadi catatan penting yang perlu dibenahi, agar setiap intervensi pembangunan yang dirancang benar-benar terarah dan memberikan kontribusi nyata terhadap capaian kinerja strategis lima tahunan perangkat daerah.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika							
- Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan				Indeks pemerintah digital (PEMDI)		
		Meningkatkan Integrasi Sistem Layanan Digital Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
					Persentase sistem layanan digital perangkat daerah yang terintegrasi		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tepat Waktu dan Akurat			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik		Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya mutu layanan pengaduan dan permohonan informasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya penyebarluasan informasi publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya mutu layanan pengaduan dan permohonan informasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
				Terselenggaranya penyebarluasan informasi publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik		Persentase sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Terkelolanya Pusat Data	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pusat Data	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya ketepatan pengembangan aplikasi informatika	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya sistem layanan Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pusat Data	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terkelolanya Pusat Data	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
				Meningkatnya ketepatan pengembangan aplikasi informatika	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Meningkatnya sistem layanan Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
				Terkelolanya jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		Meningkatkan keamanan informasi Aptika Pemerintah Daerah			Indeks KAMI		
			Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah		Persentase aplikasi pemerintah daerah yang memenuhi standart keamanan informasi	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Tersusunnya Laporan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

TABEL 4.2 PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					19.954.705.216,00		30.692.200.000,00		30.697.200.000,00		31.718.000.000,00		31.756.000.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.254.939.416,00		6.589.200.000,00		6.594.200.000,00		6.698.000.000,00		6.726.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (%)	80,1	83	85	4.254.939.416,00	85	6.589.200.000,00	85	6.594.200.000,00	86	6.698.000.000,00	86	6.726.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.425.763.000,00		2.503.000.000,00		2.503.000.000,00		2.560.000.000,00		2.570.000.000,00	
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk (%)	87,09	90	90	1.425.763.000,00	90	2.503.000.000,00	90	2.503.000.000,00	90	2.560.000.000,00	90	2.570.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					14.274.002.800,00		21.600.000.000,00		21.600.000.000,00		22.460.000.000,00		22.460.000.000,00	
Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	14.274.002.800,00	100	21.600.000.000,00	100	21.600.000.000,00	100	22.460.000.000,00	100	22.460.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					500.160.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					500.160.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (%)	40	45	50	500.160.000,00	55	700.000.000,00	60	700.000.000,00	65	750.000.000,00	70	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang memenuhi standart keamanan informasi (%)	96	97	97	500.000.000,00	97	400.000.000,00	97	400.000.000,00	97	500.000.000,00	97	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					**20.954.865.216,00**		**31.792.200.000,00**		**31.797.200.000,00**		**32.968.000.000,00**		**33.106.000.000,00**	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.954.705.216,00		30.692.200.000,00		30.697.200.000,00		31.718.000.000,00		31.756.000.000,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.254.939.416,00		6.589.200.000,00		6.594.200.000,00		6.698.000.000,00		6.726.000.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,1	85	4.254.939.416,00	85	6.589.200.000,00	85	6.594.200.000,00	86	6.698.000.000,00	86	6.726.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				74.991.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		94.000.000,00		105.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	22.000.000,00	2	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35	35	15.000.000,00	35	15.000.000,00	35	15.000.000,00	35	22.000.000,00	35	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	29.995.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13	35	9.996.000,00	35	10.000.000,00	35	10.000.000,00	35	15.000.000,00	35	20.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	22.000.000,00	2	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35	35	15.000.000,00	35	15.000.000,00	35	15.000.000,00	35	22.000.000,00	35	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.996.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13	35	9.996.000,00	35	10.000.000,00	35	10.000.000,00	35	15.000.000,00	35	20.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				29.995.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	29.995.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.593.957.000,00		3.895.000.000,00		3.895.000.000,00		3.955.000.000,00		3.955.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	2.553.975.000,00	36	3.855.000.000,00	36	3.855.000.000,00	36	3.900.000.000,00	36	3.900.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.553.975.000,00		3.855.000.000,00		3.855.000.000,00		3.900.000.000,00		3.900.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	2.553.975.000,00	36	3.855.000.000,00	36	3.855.000.000,00	36	3.900.000.000,00	36	3.900.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	9.985.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	15.000.000,00	13	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	9.997.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	20.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9.997.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	9.997.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.985.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	9.985.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	15.000.000,00	13	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				219.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		525.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	36	9.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200	200.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	36	9.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200	200.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.041.934,00		452.200.000,00		457.200.000,00		471.500.000,00		473.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	51.090.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	-	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	9.999.950,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	90.000.000,00	4	92.000.000,00	4	92.000.000,00	4	95.000.000,00	4	96.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.999.950,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	9.999.950,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.090.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	51.090.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	-	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		95.000.000,00		96.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	90.000.000,00	4	92.000.000,00	4	92.000.000,00	4	95.000.000,00	4	96.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	910	912	8.000.000,00	912	8.000.000,00	912	8.000.000,00	912	9.000.000,00	912	9.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	15.999.984,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	300	7.000.000,00	300	7.200.000,00	300	7.200.000,00	300	7.500.000,00	300	8.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	249.952.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.999.984,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	15.999.984,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	910	912	8.000.000,00	912	8.000.000,00	912	8.000.000,00	912	9.000.000,00	912	9.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				249.952.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	249.952.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	300	7.000.000,00	300	7.200.000,00	300	7.200.000,00	300	7.500.000,00	300	8.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				161.171.735,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1	-	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43	43	111.171.735,00	43	200.000.000,00	43	200.000.000,00	43	200.000.000,00	43	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1	-	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				111.171.735,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43	43	111.171.735,00	43	200.000.000,00	43	200.000.000,00	43	200.000.000,00	43	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				455.553.200,00		587.000.000,00		587.000.000,00		587.500.000,00		588.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	373.500.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	80.053.200,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				373.500.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	373.500.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				80.053.200,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	80.053.200,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				318.224.547,00		330.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	111.829.447,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	23.400.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	182.995.100,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	210.000.000,00	10	220.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				182.995.100,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	182.995.100,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	210.000.000,00	10	220.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.400.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	23.400.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				111.829.447,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	111.829.447,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.425.763.000,00		2.503.000.000,00		2.503.000.000,00		2.560.000.000,00		2.570.000.000,00		
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	87,09	90	1.425.763.000,00	90	2.503.000.000,00	90	2.503.000.000,00	90	2.560.000.000,00	90	2.570.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.425.763.000,00		2.503.000.000,00		2.503.000.000,00		2.560.000.000,00		2.570.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya mutu layanan pengaduan dan permohonan informasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	29	28	99.868.000,00	26	83.000.000,00	25	83.000.000,00	22	85.000.000,00	20	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				99.868.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	29	28	99.868.000,00	26	83.000.000,00	25	83.000.000,00	22	85.000.000,00	20	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terselenggaranya penyebarluasan informasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	7	7	1.200.395.000,00	7	2.300.000.000,00	7	2.300.000.000,00	7	2.350.000.000,00	7	2.350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	7	10	125.500.000,00	11	120.000.000,00	11	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	130.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				125.500.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	7	10	125.500.000,00	11	120.000.000,00	11	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	130.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.200.395.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.350.000.000,00		2.350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	7	7	1.200.395.000,00	7	2.300.000.000,00	7	2.300.000.000,00	7	2.350.000.000,00	7	2.350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				14.274.002.800,00		21.600.000.000,00		21.600.000.000,00		22.460.000.000,00		22.460.000.000,00		
Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	100	100	14.274.002.800,00	100	21.600.000.000,00	100	21.600.000.000,00	100	22.460.000.000,00	100	22.460.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				70.605.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terkelolanya Pusat Data	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12	12	70.605.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				70.605.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12	12	70.605.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				14.203.397.800,00		21.550.000.000,00		21.550.000.000,00		22.400.000.000,00		22.400.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya ketepatan pengembangan aplikasi informatika	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2	2	1.159.520.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				1.159.520.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2	2	1.159.520.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya sistem layanan Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	2.875.724.200,00	1	6.750.000.000,00	1	6.750.000.000,00	1	7.000.000.000,00	1	7.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				2.875.724.200,00		6.750.000.000,00		6.750.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	2.875.724.200,00	1	6.750.000.000,00	1	6.750.000.000,00	1	7.000.000.000,00	1	7.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terkelolanya jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	52	9.331.814.000,00	52	12.500.000.000,00	52	12.500.000.000,00	52	13.000.000.000,00	52	13.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				9.331.814.000,00		12.500.000.000,00		12.500.000.000,00		13.000.000.000,00		13.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	52	9.331.814.000,00	52	12.500.000.000,00	52	12.500.000.000,00	52	13.000.000.000,00	52	13.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkelolanya Pusat Data	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	1	836.339.600,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				836.339.600,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	1	836.339.600,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				500.160.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				500.160.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	40	50	500.160.000,00	55	700.000.000,00	60	700.000.000,00	65	750.000.000,00	70	800.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				500.160.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1	1	500.160.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	800.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				500.160.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1	1	500.160.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	800.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang memenuhi standart keamanan informasi	96	97	500.000.000,00	97	400.000.000,00	97	400.000.000,00	97	500.000.000,00	97	550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Tersusunnya Laporan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	12	500.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00	12	550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				500.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	12	500.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00	12	550.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

4.2 Uraian Subkegiatan Prioritas dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun sejumlah subkegiatan prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan program selama periode perencanaan.

Subkegiatan prioritas ini dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan:

- Keterkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama pembangunan daerah.
- Peran strategis Dinas Kominfo dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi, dan penguatan tata kelola data.
- Ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan.
- Dampak nyata yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Melalui subkegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan program di Dinas Kominfo mampu:

1. Mengakselerasi pencapaian sasaran RPJMD.
2. Menjadi faktor pengungkit (leverage) terhadap nilai SPBE, keterbukaan informasi publik, indeks keamanan informasi, dan tingkat kematangan data terbuka.
3. Memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam bentuk kemudahan akses informasi, keterlibatan publik, maupun layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Berikut adalah tabel 4.4 yang menggambarkan uraian subkegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah:

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	P.U 2 - Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya proporsi sistem layanan digital yang berfungsi dengan baik	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	P.U 2 - Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	P.U 2 - Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan aplikasi dan infrastruktur daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	P.U 2 - Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029, diperlukan ukuran yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan pencapaiannya.

Ukuran tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. **Indikator Kineruja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan pencapaiam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci yang berfungsi sebagai:

- Alat ukur kinerja utama yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
- Instrumen pengendali dan pemantau kinerja yang dapat digunakan secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan perbaikan kinerja dan alokasi sumber daya.

Berikut adalah tabel 4.5 yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 melalui indikator kinerja utama perangkat daerah:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
2.	Indeks pemerintah digital (PEMDI)	Indeks	1.50	1.50	1.75	1.85	2	2.15	2.25	
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.06	2.07	2.10	2.15	2.20	2.50	2,65	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,5	87	87	87	87	87	87	
5.	Indeks KAMI	Indeks	440	647	670	690	710	730	750	
6.	Persentase sistem layanan digital perangkat daerah yang terintegrasi	%	3.59	4	6	8	10	12	14	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Nganjuk selama periode 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur yang spesifik pada setiap program dan kegiatan. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah.

IKK berfungsi untuk:

- Menilai efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Dinas Kominfo.
- Memonitor pencapaian kinerja program dan subkegiatan secara periodik.
- Menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Berikut disajikan tabel 4.6 yang memuat IKK Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk beserta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	positif	%	3.85	4	6	8	10	12	14	
5.	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	positif	%	97.11	98	98	98	98	98	98	
6.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
7.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
10.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	positif	%	96.40	97	97	97	97	97	97	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001